



APBD DKI Rp 73 Triliun Disetujui

Prioritas anggaran untuk penanganan banjir, rumah susun, dan transportasi.

Ali Nur Yasin

ali@tempo.co.id

JAKARTA — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta mengesahkan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2015 sebesar Rp 73,08 triliun menjadi peraturan daerah. Prioritas pembangunan pada tahun anggaran ini adalah seputar penanganan banjir, pembangunan rumah susun sederhana sewa, dan pembenahan transportasi.

Wakil Ketua Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik mengatakan anggaran yang disetujui disesuaikan setelah dibahas bersama Dewan. Pada kebijakan umum anggaran prioritas plafon anggaran sementara (KUA-PPAS), pemerintah DKI mengalokasikan Rp 76,9 triliun.

Adapun penyesuaian anggaran dilakukan terhadap penyertaan modal pemerintah, proyeksi sisa lebih penggunaan anggaran, dan alokasi anggaran pendidikan. Adapun penyertaan modal kepada tiga badan usaha milik daerah disetujui sebesar Rp 5,6 triliun. Dana tersebut adalah untuk PT Mass Rapid Transit Jakarta sebesar Rp 4,6 triliun, PT Transjakarta Rp 500 miliar, dan PT Bank DKI Rp 500 miliar. Sebelumnya, pemerintah DKI mengusulkan delapan badan usaha milik daerah menerima penyertaan modal.

Sedangkan untuk perubahan nilai sisa lebih penggunaan anggaran, ditetapkan sebesar Rp 8,9 triliun dari proyeksi Rp 6 triliun. Menurut Taufik, perubahan sisa lebih tersebut dialokasikan untuk penambahan anggaran pendidikan dari 20 persen menjadi 27 persen, dan anggaran kesehatan menjadi 9 persen.

Selain penyesuaian, Taufik berujar, Dewan menghapus beberapa proyek kegiatan, yakni anggaran Rp 300 miliar bagi studi pembangunan kereta *light rail transit* (LRT). Alasannya, pemerintah DKI terburu-buru mengajukan anggaran tersebut. DKI juga tak menyertakan skema operasional dan penjelasan subsidi tarif. "Tak ada penjelasan rinci."

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menyatakan pemerintah menyetujui semua penyesuaian tersebut. Menurut dia, penghapusan anggaran proyek LRT akan diganti dengan mengerahkan perusahaan pengembang properti swasta. Dengan begitu, pemerintah DKI tak perlu mengeluarkan anggaran untuk mewujudkan moda transportasi massal tersebut. "Alasan Dewan benar, kami belum laporkan konsepnya seperti apa," ujarnya.

Ahok menjelaskan, prioritas pembangunan pada 2015 masih seputar penanganan banjir, pembangunan rumah susun sederhana sewa, dan pembenahan transportasi. Total anggaran untuk ketiga prioritas tersebut mencapai Rp 13,6 triliun.

Anggaran tersebut dialokasikan untuk Dinas Tata Air dan Dinas Bina Marga sebesar Rp 6 triliun. Sedangkan anggaran Rp 1,303 triliun untuk Dinas Pertamanan dan Pemakaman. Proyek yang mereka tangani, di antaranya, meliputi normalisasi sungai, perbaikan jalan, dan pembebasan lahan. "Kami berikan nilai yang besar untuk kedua dinas tersebut," kata Ahok.

Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) DKI Jakarta Sarman Simanjorang

berharap penyerapan anggaran pada tahun ini lebih optimal dibanding pada 2014. Rendahnya penyerapan anggaran berdampak pada pertumbuhan ekonomi Jakarta yang hanya 5-6 persen.

● LINDA HAIRANI | PRAGA UTAMA | GANGSAR PARIKESIT